

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 yaitu “ **Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas** “ dengan Prioritas Pembangunan “ **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri** ”. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Bidang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 ini, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Ambon, Maret 2023

Pt. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU,



Ir. SADLI IE. M.Si., IPU.
Pembina Utama Madya
NIP. 196808281994031010

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	18
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangka Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan.....	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1	Realisasi Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan Tahun 20229
Tabel .2	Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari dana APBD Tahun 202212
Tabel .3	Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022yang bersumber dari dana APBD..... 13
Tabel .4	Pecapaian IKU, Sasaran Strategis Tahun 2022.....18
Tabel .5	Pecapaian IKU, Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 202219
Tabel .6	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 202425

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel T- C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	28
Lampiran 2. Tabel T- C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	33
Lampiran 3. Tabel T- C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	36
Lampiran 3. Tabel T- C 33 Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Bidang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah Maluku dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana

Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu : Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan renja, perumusan rancangan akhir renja dan penetapanrenja SKPD.Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah Renstra yang telah mengakomodir implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan kewenangannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
 18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
 20. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk satu tahun mendatang dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta indikator kinerja yang harus dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pernyataan, komitmen dan arahan Kepala Dinas terkait Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Revisi Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

(Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan maka kegiatan pembangunan kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 menghasilkan keluaran kegiatan seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1. Realiasi Capaian Indikator Keluaran Tahun 2022

Indikator Keluaran	Realisasi	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	Dokumen Renja, DPA dan RKA dan RKTP
Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	11 UPTD KPH
Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	330 Orang	11 Kab/Kota, per lokasi jumlah peserta 30 org (terdiri dari unsur pemerintahan dan stake holder terkait)
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Jenis
Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	1 Paket	27 Jenis
Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	40 Jenis
Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6 Jenis
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	Makan Minum Pimpinan 12 bulan dan makan minum rapat untuk 12 Bulan
Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	Pusat dan Kab/Kota
Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit Mobil dan 3 Unit Motor	2 unit Mobil dan 3 Unit Motor
Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	Kursi rapat (28 bh), kursi ruang smoking area (8 set), kursi tamu (4 set) meja kerja Es III (5 bh), lemari arsip 2 pintu (12 bh), Roller Blind (25 M)
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	Ac split (3 unit), camera digital (1 unit), Mesin Absensi scan jari dan sensor wajah (15 unit), Printer (2 unit), Tripod camera (1 unit), Laptop (4 unit) dan Personal Komputer (4 unit)
Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	

Indikator Keluaran	Realisasi	
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Listrik Gedung Kantor, Gedung Lab. Inokulan Gaharu, Gedung Persemaian Permanen Kota Ambon dan Gedung Persemaian Permanen Kab. SBT
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	24 Orang Tenaga Honorer
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33 Unit	29 unit kendaraan roda 2 dan 14 unit kendaraan roda 4
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	91 Unit	Komputer (20 unit), Ac (30 unit), Laptop (20 unit), sound system (1 unit) dan Printer (20 unit)
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	Gedung Kantor dan Gedung Lab. Inokulan Gaharu
Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 unit	Pembangunan Pagar Kantor UPTD KPH MTB dan UPTD KPH Aru, Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPH SBB, Malteng dan Kota Ambon beserta perabot dan peralatan kantor
Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	7 Laporan	Kab. KKT (Desa Atubul) Kab. MBD (Desa Klis) Kab. Bursel (Desa Fogi), Kab. Buru (Desa Waipoti), Kab. SBT (Desa Dawang), Kab. SBB (Desa Kamarian),
Jumlah Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	21 Laporan	21 Unit IUPHHK/PHAT (Pemegang Izin Usahan Pengelolaan Hutan di Kab. Buru, Bursel, Malteng dan KKT)
Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	10 Laporan	10 Lokasi PB-PH Pemegang Izin Usahan Pengelolaan Hutan di Kab. Buru, Bursel, Malteng dan KKT & Rapat Bimtek Penyusunan RPHJPD UPTD KPH 1 Kali, bagi 11 UPTD KPH.
Jumlah Laporan Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK	2 Laporan	Pembangunan 2 Rumah Produksi Minyak Kayu putih di Desa Waprea dan Wasipait Kab. Buru
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	348 Ha	Kab. SBB (48 Ha di Desa Nuruwe, Kairatu, Pakarena, Air Buaya), Kab. SBT (100 Ha di desa Gah), Kab. Malteng (100 Ha di Desa Besi) Kab. MBD (100 HA di Desa Kaiwatu)
Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	27.32 Ha	Penanaman Mangrove seluas 12 HA di 10 Kab/Kota (Ambon, Malteng, SBT, SBB, Buru, Bursel, Malra, Tual, KKT dan MBD), Penanaman turus Jalan sepanjang 12,768 Km (7.66 Ha) di Kab. SBT, Malteng, SBB, Buru, Bursel, Malra dan Tual

Indikator Keluaran	Realisasi	
Jumlah kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	11 Unit	Penyediaan Bibit/anakan sebanyak 82.274 di 9 unit Kebun bibit di KPH (MBD, Tual, Aru, Tanimbar, Buru, Bursel, SBB, Malteng dan Ambon) 2 Persemaian permanen di KPH SBT dan di Kota Ambon (Air Besar)
Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Laporan	pembinaan pengendalian pelaksanaan RHL pada 11 Kab/Kota
Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Laporan	Pelaksanaan patroli dan operasi pengamanan hutan pada 8 lokasi (Ambon, SBB, Malteng, SBT, Buru, Bursel, KKT dan Aru)
Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi dan Sarpras Kebakaran Hutan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1 Laporan Sarpras : Pakaian pelindung (50 pasang), Sepatu Boot (50 Pasang), Helm (50 pasang), kacamata (50 pasang), sarung tangan (50 pasang), pompa punggung (50 pasang), keyyok (50 bh), selang (3 roll), Megaphone (3 unit), Lampu kepala LED (50 bh), Mobil Personil (1 unit) dan 1 Laporan Patroli/Sosialisasi 8 Kali.
Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah dan Pembinaan pengendalian pengelolaan IUIPHHK	105 Unit	Pembinaan dan pengendalian 105 Izin IUIPHHK
Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	19, 6 Ha	Pelaksanaan Sosialisasi penetapan KEE di Kab. Buru dan Malteng
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	Kab. SBB 7 KTH (Desa Hunitetu 1, Lumoli 1 Seruawan 1 dan honitute 4), Kab. Malteng 3 KTH (Dusun Melinani 1, Desa Siatele 1 dan Desa Haya 1), Kab. SBT 1 KTH (Desa Dream land hills), Ambon 1 KTH desa Nusaniwe, Kab. Bursel 2 KTH (Desa Wailikut 1 dan Desa Simi 1), Kab. Buru 1 KTH desa Reheriat
Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	28 Ha	Kab. SBB 9 Lokasi (Desa Hunitetu, Morekau, Lumoli, Ariate, Seruawan, Kamarian, Ruamahkay dan Seriholo), Kab. Malteng 2 lokasi (Dusun Melinani), Kab. SBT 3 Lokasi (Desa Bula, Madak, Keta).
Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	27.7 Ha di Ambon (Desa Soya)
Jumlah bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug	300 Unit	Dam Penahan : 50 Unit di Kab. Malteng (seram utara), 50 unit di Kab. KKT (Kec. Wertamrian), dan 50 Unit di Kab. MBD (Moa Lakor). Gully Plug : 50 Unit di Kab. Malteng (seram utara), 50 unit di Kab. Malra (Kei Besar Tengah) dan 50 unit di Kab. MBD (Moa Lakor).
Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Laporan	Pembinaan Pengendalian Kegiatan pada 11 Kab/Kota

Hasil Kegiatan tersebut di atas berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kehutanan untuk meningkatkan :

1. Produktifitas kehutanan.
2. Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD-KPH.
3. Kuantitas dan kualitas tutupan hutan.
4. Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasi sampai dengan Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Sasaran strategis tersebut diatas dicapai melalui 5 program, 15 kegiatan dan 176 sub kegiatan. Total Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2022 (termasuk 11 UPTD KPH) setelah perubahan adalah sebesar Rp **111.704.751.663,-**, dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp. 93.138.115.328,-
2. Belanja Modal Rp. 18.566.636.335,-

Anggaran Kegiatan Tahun 2022 jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 84.851.620.143,- mengalami kenaikan sebesar Rp.26.853.131.520,- atau 31,65 %. Kenaikan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku disebabkan karena Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari DBH-DR dan kenaikan alokasi DAK Sub Bidang Kehutanan. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Operasi	93.138.115.328	83.264.468.923	89.50	100	9.873.646.405
2	Belanja Modal	18.566.636.335	15.335.963.755	82.60	82.60	3.230.672.580
	TOTAL	111.704.751.663	98.600.432.678	88,27	91.30	13.104.318.985

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Realisasi Program Kegiatan Dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	% Keu	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,060,504,975	5,200,610,057	85.81	100	859,894,918
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,128,599,667	933,940,504	82.75	100	194,659,163
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,128,599,667	933,940,504	82.75	100	194,659,163
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528,858,222	435,061,184	82.26		93,797,038
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	229,529,601	188,705,492	82.21	100	40,824,109
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	299,328,621	246,355,692	82.30	100	52,972,929
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	711,340,728	558,995,737	78.58		152,344,991
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,089,000	23,072,660	99.93	100	16,340
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	31,885,000	21,992,900	68.98	100	9,892,100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102,636,178	99,321,961	96.77	100	3,314,217
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,795,550	55,619,850	97.93	100	1,175,700
	Fasilitas Kunjungan Tamu	88,560,000	88,560,000	100.00	100	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408,375,000	270,428,366	66.22	100	137,946,634
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,509,347,000	1,465,118,140	97.07		44,228,860
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	730,727,000	688,480,000	94.22	100	42,247,000
	Pengadaan Mebel	281,800,000	280,579,140	99.57	100	1,220,860
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	496,820,000	496,059,000	99.85	100	761,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	926,129,358	846,342,046	91.38		79,787,312
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	12,190,000	9,879,000	81.04	100	2,311,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143,040,000	68,235,917	47.70	100	74,804,083

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770,899,358	768,227,129	99.65	100	2,672,229
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,256,230,000	961,152,446	76.51		295,077,554
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	764,910,000	496,975,109	64.97	100	267,934,891
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,000,000	64,010,000	98.48	100	990,000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426,320,000	400,167,337	93.87	100	26,152,663
2	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	39,132,731,461	34,107,827,629	87.16		5,024,903,832
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	8,135,290,000	8,044,404,273	98.88		90,885,727
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	8,135,290,000	8,044,404,273	98.88	100	90,885,727
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6,372,527,305	5,641,184,470	88.52		731,342,835
	Penyediaan data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	920,005,339	754,095,895	81.97	100	165,909,444
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1,998,753,569	1,600,581,699	80.08	100	398,171,870
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	691,236,117	637,328,366	92.20	100	53,907,751
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan	2,762,532,280	2,649,178,510	95.90	100	113,353,770
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	17,378,461,620	16,663,960,084	95.89		714,501,536
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	8,999,499,930	8,732,574,532	97.03	100	266,925,398
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4,879,261,928	4,575,598,284	93.78	100	303,663,644
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	3,149,699,762	3,078,316,568	97.73	100	71,383,194
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	350,000,000	277,470,700	79.28	100	72,529,300
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6,736,528,196	3,371,932,275	50.05		3,364,595,921
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1,778,350,725	1,504,798,732	84.62	100	273,551,993

1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	4,958,177,471	1,867,133,543	37.66	70.99	3,091,043,928
	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	509,924,340	386,346,527	75.77		123,577,813
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kyu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	509,924,340	386,346,527	75.77	100	123,577,813
3	PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	424,998,641	348,215,280	81.93		76,783,361
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	424,998,641	348,215,280	81.93		76,783,361
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	424,998,641	348,215,280	81.93	100	76,783,361
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6,627,986,200	6,266,874,700	94.55		361,111,500
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6,627,986,200	6,266,874,700	94.55		361,111,500
	Penguatan dan pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3,699,999,950	3,445,016,450	93.11	100	254,983,500
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2,927,986,250	2,821,858,250	96.38	100	106,128,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	16,041,159,527	12,094,336,071	75.40		3,946,823,456
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	16,041,159,527	12,094,336,071	75.40		3,946,823,456
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	701,160,137	688,763,177	98.23	100	12,396,960
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	14,240,000,000	10,530,069,500	73.95	75	3,709,930,500
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1,099,999,390	875,503,394	79.59	100	224,495,996
6	Belanja UPTD KPH (11 Kab/Kota)	8,256,315,739	7,393,270,455	89.55	100	863,045,284
7	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	35,161,055,120	33,241,478,786	94.54	100	1,919,576,334

Grand Total	111,704,751,663	98,652,612,978	88.32	91.30	13,052,138,685
-------------	-----------------	----------------	-------	-------	----------------

Realisasi fisik kegiatan tahun 2022 sebesar 95,86 %, sementara sisa anggaran merupakan sisa biaya belanja pegawai (gaji dan tunjangan), sisa biaya belanja modal, sisa tender dan sisa biaya perjalanan dinas.

B. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tidak mendapatkan alokasi Dana APBN.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2019-2024 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan, memfasilitasi klaim hak ulayat masyarakat adat dan areal pemegang izin guna meminimalisir konflik tenurial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan, mengoptimalkan tata kelola layanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta melakukan upaya menurunkan gas rumah kaca dalam rangka komitmen pelaksanaan kebijakan perubahan iklim.

Pembangunan kehutanan Tahun 2022 diprioritaskan pada upaya mengoptimalkan aneka fungsi pemanfaatan hutan, optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas tersebut dalam rangka mewujudkan Misi ke-3 Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan”** sebagaimana telah dijabarkan dalam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Maluku yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Tahun 2019-2024.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2022 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bersumber Anggaran dari APBD digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku periode 2019-2024, yaitu :

- 1) **Meningkatnya Produktifitas Hutan.** Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :
 - a. Penertiban perijinan pemanfaatan hasil hutan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan produksi hasil

hutan (Kayu/bukan kayu dan jasa lingkungan)

- b. Meningkatnya Ekonomi Hutan melalui peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dengan indikator kinerja adalah jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan).
- c. Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak melalui UPTD KPH.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kehutanan dengan indikator kinerja adalah terpenuhinya kompetensi aparatur pada Dinas Kehutanan dan UPTD KPH.
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan KPH melalui pembangunan kantor UPTD KPH di tingkat tapak dengan indikator adalah jumlah bangunan KPH yang terbangun.

2) **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan,**

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan lingkungan dan pembuatan bangunan konservasi tanah dengan indikator kinerja adalah persentase lahan kritis yang ditanami.
- b. Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan dan sumber daya hutan akibat gangguan alam, ternak dan manusia, pencegahan kebakaran hutan dan praktek-praktek perambahan hutan dan pembalakan liar, peningkatan biomassa hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan.
- c. Pemantapan kawasan hutan melalui monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan baik yang prosedural maupun yang non prosedural dengan indikator pengelolaan kawasan sesuai regulasi.

3) **Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial,** Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Terbangunnya 73 unit Perhutanan Sosial (HKm, HTR, HD, HA dan pola kemitraan) secara mandiri melalui fasilitasi dan pendampingan oleh penyuluh.

- b. Pengelolaan areal PS dengan sistem agroforestry dan pemberian izin Pemanfaatan potensi yang terkandung di dalam areal perhutanan sosial seluas 102.482 Ha (73 Unit).

Capaian terhadap 3 sasaran kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Tabel Pencapaian IKU Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatkan produktifitas kehutanan	Produksi Kayu	M3/Thn	308.000	277.284,32	90,03
		Produksi HHBK	Ton/Thn	820	11.459,50	100
2	Meningkatkan ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis kepulauan	Rehabilitasi lahan kritis	%	0,34	0,62	100
		Kualitas Penutupan Lahan	%	69	65.84	95,42
3	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan areal perhutanan sosial	Unit	15	24	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kehutanan sebesar Rp. **114.704.275.798,-** dan setelah dilakukan pergeseran APBD berubah menjadi Rp.**111.704.751.663,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tiga sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Sasaran tersebut adalah :

1. Produktifitas kehutanan.
2. Kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan.
3. Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut di atas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 5. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatkan produktifitas kehutanan	Produksi Kayu	M3/Thn	308.000	277.284,32	90,03
		Produksi HHBK	Ton/Thn	820	11.459,50	100
2	Meningkatkan ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis kepulauan	Rehabilitasi lahan kritis	%	0,34	0,62	100
		Kualitas Penutupan Lahan	%	69	65.84	95,42
3	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan areal perhutanan sosial	Unit	15	24	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi

capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel T-C.29 terlampir.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu degradasi dan deforestasi hutan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya adalah sebagai berikut :

1. Luas lahan kritis
2. Klaim kepemilikan hak ulayat dalam kawasan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan non prosedural
4. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat/ skema Perhutanan Sosial

Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh corporate menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial.

5. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengawasan sumber daya hutan
6. Belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan
7. Memaksimalkan Kesatuan Pengelolaan Hutan
8. Terbatasnya sumber daya manusia

Berdasarkan uraian diatas, dalam penentuan isu-isu strategis pada Dinas Kehutanan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan

terhadap visi, misi dan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan memperhatikan Visi Pemerintah Daerah yaitu **“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”**.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Permasalahan yang dihadapi saat ini dan merupakan kondisi pembangunan kehutanan di Maluku antara lain :

1. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik
2. penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi.
3. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat.
4. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
5. Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu dan non kayu) sebagai dasar penyusunan rencana makrokehutanan.
6. Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Maluku.
7. Belum optimalnya promosi, investasi serta inkonsistensi regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan kebijakan sistem pemerintahan daerah.
8. Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan.

9. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan daya beli masyarakat sekitar hutan.
10. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan.
11. Peran Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan belum optimal
Persepsi, motivasi dan partisipasi kesadaran lingkungan pemangku kepentingan masih rendah.
12. Belum terciptanya sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
13. Masih terjadinya pencurian hasil hutan, pembalakan liar dan gangguan keamanan hutan lainnya.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konflik tenurial.
2. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.
3. Tingginya kebutuhan lahan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan.
5. Tingginya degradasi dan deforestasi.
6. Belum mantapnya kawasan hutan.
7. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan hutan.
2. Tersedianya anggaran pembangunan.
3. Kawasan hutan yang luas.
4. Peraturan perundangan bidang kehutanan.
5. Tingginya permintaan hasil hutan.

6. Minat investasi di bidang kehutanan.
7. Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD, dari jumlah program dan kegiatan telah sesuai dengan hasil analisis dan kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku guna melaksanakan pembangunan kehutanan di Tahun 2024. Ini terbukti dengan telah dialokasikan anggaran yang memadai operasional bagi UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang mempunyai wilayah kerja di 11 Kabupaten/Kota. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh UPTD-KPH, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah memiliki keragaman. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di masing-masing UPTD-KPH, yang selanjutnya akan dikompilasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Maluku pada Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dapat dilihat pada table T-C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan termasuk dalam Bidang prioritas kebijakan Nasional yang ke 9 (sembilan) yaitu : **“Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana “** dimana lebih dikhususkan pada masalah Lingkungan Hidup (hutan dan pelestarian hutan). ***Penyusunan Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 2024 diprioritaskan untuk mendukung pembangunan hutan berkelanjutan untuk mencapai Folu Net Sink 2030.***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan Renja Tahun terakhir periode RPJMD 2019-2024 yang disusun dengan tujuan sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Maluku yang terintegrasi, efisien, efektif dan komprehensif untuk kurun waktu 1 Tahun.

Berdasarkan tujuan selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menjabarkannya dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU tahun 2024 telah mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 2019-2024 serta perubahan RPJMD Maluku 2019-2024.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2019-2024 adalah pada tabel 6. berikut:

Tabel 6. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Volume Produksi Kayu	m ³ /Thn	250.000
		Volume Produksi HHBK	Ton/Thn	6.000
		Jumlah Komoditi Unggulan KPH	Komoditi	4
Meningkatkan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional	Fungsi hutan yang berkualitas	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	300
	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan social	Jumlah kelompok pemnafaatan areal Perhutanan Sosial (PS)	Kel	23

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang telah disusun dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kehutanan Se-Provinsi Maluku Tahun 2023, maka rencana Program dan Kegiatan bidang Kehutanan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 kegiatan :**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Pengelolaan Hutan, dengan 5 kegiatan :**
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - b. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
 - c. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - e. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun.
3. **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dengan kegiatan :** Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. **Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan :** Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
5. **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kegiatan :** Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

A. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Rencana Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebar di semua Kab / Kota.

B. Jumlah Pagu Indikatif

Rencana Kebutuhan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 (termasuk 11 UPTD KPH) sebesar Rp. 90.631.032.941,- dengan rincian :

No.	Sumber Dana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	APBD	5	15	90.631.032.941
TOTAL		5	15	90,631.032.941

(Tabel T-C.33 terlampir).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 ini telah disusun melalui proses Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kehutanan Se-Provinsi Maluku Tahun 2023. Program dan kegiatan Renja ini juga telah mempedomani Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan UPTD KPH, namun keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renja ini sangat tergantung dari alokasi anggaran yang cukup serta kinerja aparatur kehutanan yang tinggi. Untuk itu diharapkan adanya komitmen bersama dari para pihak agar pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku dapat terselenggara dengan baik sehingga Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ***Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan*** dapat tercapai.

LAMPIRAN
RENJA TAHUN 2024

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Darah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Maluku

Dinas Kehutanan

Lembar : 1

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Relalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
3															
	Urusan Pemerintah Pilihan														
3	28														
	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan														
3	28	01													
	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah													
3	28	01	1	01											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang terstruktur dan bersinergi antara Provinsi													
3	28	01	1	01	01										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	2	Dok	3	Dok	3	Dok	100	3	Dok	8	2.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan administrasi kepegawaian													
	Monitoing, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Lap	3	Dok	1	Dok	1	dok	100	1	Dok	5	5.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Pkt	11	UPTD	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	13	13.00
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	1	Pkt	12	Bulan	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	14	14.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	1	Pkt	12	Bulan	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	14	14.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1	Pkt	12	Bulan	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	14	14.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			1	Dok	0		0		0	0		12	12.00
2	02	2	02	01	02										
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	Laporan	12	Bulan	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	14	14.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Restra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Relalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Bulan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	20	1.00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 Unit	7 Unit	5 Unit	5 Unit	100	0	12	3.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	42 Unit	1 Paket	1 Paket	100	0	43	43.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	14 Unit	30 Unit	30 Unit	100	3 Unit	47	4.70
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	3.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Lap	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	14	14.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	3.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 Unit	38 Unit	33 Unit	33 Unit	100	48 Unit	119	2.25
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	50 Unit	91 Unit	91 Unit	100	51 Unit	192	3.15
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100	1 Unit	4	2.00
	Program Pengelolaan Hutan									
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100	0	7	1.40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Restra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Relalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
											6
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									
		Penyediaan data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu)	11 Lap	7 Lokasi	7 Laporan	7 Laporan	100	11 Laporan	25	2.27
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Lap	21 Unit	21 Laporan	21 Laporan	100	11 Laporan	53	4.82
		Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah laporan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lap		10 Laporan	10 Laporan	100	4 Laporan	14	3.50
		Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK	11 Lap	7 Lap	2 Laporan	2 Laporan	100	11 Laporan	20	1.82
		Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									
		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersedia	1 Dok		0	0	0	1 Dok	1	1.00
		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	275 Ha	93 Ha	348 Ha	348 Ha	100	192 Ha	633	2.30
		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	80 Ha	27,32 Ha	27,32 Ha	100	25 Ha	132,32	5.29
		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	2 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit	100	2 Unit	23	11.50
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Lap	11 Lokasi	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	33	3.00
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Lap	9 Lokasi	8 Laporan	8 Laporan	100	11 Laporan	28	2.55
		Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi dan Sarpras Kebakaran Hutan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Lap	9 Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	100	11 Laporan	22	2.00
		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Restra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Relalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dok	36 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dok	3	3.00
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug	450 Unit	257 Unit	300 Unit	300 Unit	100	75	632	1.40
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Laporan	11 Lokasi	11 Laporan	11 Laporan	100	0	22	2.00

Ambon, Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,

Ir. SADALIE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199403 1 010

**TABEL T- C.31
REVIEW TERHADAP RKDP TAHUN 2024
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU**

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28	URUSAN PILIHAN						URUSAN PILIHAN					
3.28	KEHUTANAN						KEHUTANAN					
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.00 Person	20,002,888,855.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00 Person	20,002,888,855.00	
3.28.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					837,758,900.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				837,758,900.00	
3.28.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					211,975,668.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				211,975,668.00	
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambon	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	211,975,668.00	APBD-DAU	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambon	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	211,975,668.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03	Administrasi Umum					15,715,380,276.00	Administrasi Umum				15,715,380,276.00	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,747,800.00	APBD-DAU	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,747,800.00	APBD-DAU
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ambon	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	1 Paket	16,497,547.00	APBD-DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ambon	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	1 Paket	16,497,547.00	APBD-DAU
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	95,776,624.00	APBD-DAU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	95,776,624.00	APBD-DAU
3.28.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ambon	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43,903,805.00	APBD-DAU	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ambon	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43,903,805.00	APBD-DAU
3.28.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	119,402,250.00	APBD-DAU	Facilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	119,402,250.00	APBD-DAU
3.28.01.1.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	576,052,250.00	APBD-DAU	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	576,052,250.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.10	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	Penyediaan anggaran operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	11 UPTD	14,850,000,000.00	APBD-DAU-DBH	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	Penyediaan anggaran operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	11 UPTD	14,850,000,000.00	APBD-DAU-DBH
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					580,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580,000,000.00	
3.28.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 Unit	180,000,000.00	APBD-DAU	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	180,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	200,000,000.00	APBD-DAU	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	200,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	200,000,000.00	APBD-DAU	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	200,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,008,330,611.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,008,330,611.00	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16,500,000.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16,500,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	128,920,000.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	128,920,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	862,910,611.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	862,910,611.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,649,443,400.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,649,443,400.00	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 Unit	841,614,400.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 Unit	841,614,400.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	57,829,000.00	APBD-DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	57,829,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	750,000,000.00	APBD-DAU	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	750,000,000.00	APBD-DAU

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	70.00 Persen	55,262,344,738.00		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	70.00 Persen	55,262,344,738.00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				13,742,888,855.00		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				13,742,888,855.00	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Malra, Tual, Bursel, MBD, Aru dan KKT	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	13,742,888,855.00	APBD-DBH	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Malra, Tual, Bursel, MBD, Aru dan KKT	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	13,742,888,855.00	APBD-DBH
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				2,261,358,200.00		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				2,261,358,200.00	
3.28.03.1.03.04	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kab/kota	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	11 Lap	540,589,700.00	APBD-DBH	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kab/kota	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi	11 Lap	540,589,700.00	APBD-DBH
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	13 Unit IUPHHK	Jumlah Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	13 Unit IUPHHK	Jumlah Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.03.05	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lokasi	Jumlah laporan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lap	420,768,500.00	APBD-DBH	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lokasi	Jumlah laporan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lap	420,768,500.00	APBD-DBH
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	11 Kab/kota	Jumlah Laporan Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK	11 Lap	550,000,000.00	APBD-DBH	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	11 Kab/kota	Jumlah Laporan Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK	11 Lap	550,000,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				30,479,030,734.00		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				30,479,030,734.00	
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 Dok	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersedia	1 Dok	367,497,410.00	APBD-DBH	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 Dok	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersedia	1 Dok	367,497,410.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.02	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	Maleng, SBB, SBT, Buru, Malra dan MBD	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	17,875,000,000.00	APBD-DBH	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	Maleng, SBB, SBT, Buru, Malra dan MBD	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	17,875,000,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	11 Kab/Kota	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	8,810,493,432.00	APBD-DBH	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	11 Kab/Kota	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	8,810,493,432.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Ambon, dan SBT	Jumlah kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	2 Unit	2,568,785,042.00	APBD-DBH	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Ambon, dan SBT	Jumlah kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	2 Unit	2,568,785,042.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Lap	857,254,850.00	APBD-DBH	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Lap	857,254,850.00	APBD-DBH
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Berkurangnya tingkat kerusakan hutan		8,479,066,949.00		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Berkurangnya tingkat kerusakan hutan		8,479,066,949.00	
3.28.03.1.05.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Lap	1,778,841,965.00	APBD-DBH	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Lap	1,778,841,965.00	APBD-DBH
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi dan Sarpras Kebakaran Hutan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Lap	6,700,224,984.00	APBD-DBH	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi dan Sarpras Kebakaran Hutan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Lap	6,700,224,984.00	APBD-DBH
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				300,000,000.00		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				300,000,000.00	
3.28.03.1.07.02	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kyu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Kab/kota	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah dan Pembinaan pengendalian pengelolaan IUIPHHK	90 Unit	300,000,000.00	APBD-DBH	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kyu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Kab/kota	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah dan Pembinaan pengendalian pengelolaan IUIPHHK	90 Unit	300,000,000.00	APBD-DBH
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	79.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	79.00 Persen	275,706,848.00		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	79.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	79.00 Persen	275,706,848.00	

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				40,500,000.00		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				40,500,000.00	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	P. Ambon	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Lap	40,500,000.00	APBD-DBH	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	P. Ambon	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Lap	40,500,000.00	APBD-DBH
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk		235,206,848.00		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk		235,206,848.00	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Buru, Malteng, SBT	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6 Ha	235,206,848.00	APBD-DBH	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Buru, Malteng, SBT	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6 Ha	235,206,848.00	APBD-DBH
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				7,290,092,500.00		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				7,290,092,500.00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				7,290,092,500.00		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				7,290,092,500.00	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	3,501,000,000.00	APBD-DBH	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	3,501,000,000.00	APBD-DBH
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11 Kab/Kota	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	15 Kelompok	3,789,092,500.00	APBD-DBH	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11 Kab/Kota	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	15 Kelompok	3,789,092,500.00	APBD-DBH
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	7,800,000,000.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	7,800,000,000.00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				7,800,000,000.00		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				7,800,000,000.00	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	11 Kab/kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dok	750,000,000.00	APBD-DBH	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	11 Kab/kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dok	750,000,000.00	APBD-DBH
3.28.06.1.01.02	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Buru, Bursel, Malra, SBB, Malteng dan SBT	Jumlah bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug	450 Unit	6,300,000,000.00	APBD-DBH	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Buru, Bursel, Malra, SBB, Malteng dan SBT	Jumlah bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug	450 Unit	6,300,000,000.00	APBD-DBH
3.28.06.1.01.02	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH
Grand Total					90,631,032,941.00						90,631,032,941.00	

DAU 20,002,888,855.00
DBH-DR 70,628,144,086.00

Ambon, Maret 2023
Ptt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,

Ir. SADLI IE, M.Si, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199403 1 010

TABEL T- C.32
USULAN PROGRAM DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi (UPTD KPH)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.28	URUSAN PILIHAN				
3.28	KEHUTANAN				
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00 Persen	
3.28.01.1.03.10	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	11 Kab/Kota	Penyediaan anggaran operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	11 UPTD/KPH	

Ambon, Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku,

Ir. SADLI IE, M.Si, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199403 1 010

TABEL T- C.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Tahun 2024			Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	URUSAN PILIHAN								
3.28	KEHUTANAN								
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00 Persen	20,002,888,855.00			100.00 Persen	20,002,888,855.00
3.28.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				837,758,900.00				837,758,900.00
3.28.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU		3.00 Dokumen	837,758,900.00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				211,975,668.00				211,975,668.00
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambon	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	211,975,668.00	APBD-DAU		1 Dok	211,975,668.00
3.28.01.1.03	Administrasi Umum				15,715,380,276.00				15,715,380,276.00
3.28.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,747,800.00	APBD-DAU		1 Paket	13,747,800.00
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ambon	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	1 Paket	16,497,547.00	APBD-DAU		1 Paket	16,497,547.00
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	1 Paket	95,776,624.00	APBD-DAU		1 Paket	95,776,624.00
3.28.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ambon	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43,903,805.00	APBD-DAU		1 Paket	43,903,805.00
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	119,402,250.00	APBD-DAU		1 Laporan	119,402,250.00
3.28.01.1.06.09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	576,052,250.00	APBD-DAU		20 Laporan	576,052,250.00
3.28.01.1.03.10	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	Penyediaan anggaran operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	11 UPTD	14,850,000,000.00	APBD-DAU-DBH		11 UPTD	14,850,000,000.00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580,000,000.00				580,000,000.00
3.28.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang	4 Unit	180,000,000.00	APBD-DAU		4 Unit	180,000,000.00
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	200,000,000.00	APBD-DAU		1 Paket	200,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Tahun 2024					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	200,000,000.00	APBD-DAU		10 Unit	200,000,000.00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,008,330,611.00				1,008,330,611.00
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16,500,000.00	APBD-DAU		1 Laporan	16,500,000.00
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	128,920,000.00	APBD-DAU		1 Laporan	128,920,000.00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	862,910,611.00	APBD-DAU		1 Laporan	862,910,611.00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,649,443,400.00				1,649,443,400.00
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 Unit	841,614,400.00	APBD-DAU		53 Unit	841,614,400.00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	57,829,000.00	APBD-DAU		61 Unit	57,829,000.00
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	750,000,000.00	APBD-DAU		2 Unit	750,000,000.00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	70.00 Persen	55,262,344,738.00			70.00 Persen	55,262,344,738.00
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				13,742,888,855.00				13,742,888,855.00
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Malra, Tual, Bursel, MBD, Aru dan KKT	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	13,742,888,855.00	APBD-DBH		5 Unit	0.00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				2,261,358,200.00				2,261,358,200.00
3.28.03.1.03.04	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kab/kota	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	11 Lap	540,589,700.00	APBD-DBH		11 Lap	540,589,700.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025				
			Tahun 2024					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	13 Unit IUPHHK	Jumlah Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di	13 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH		13 Lap	750,000,000.00			
3.28.03.1.03.05	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lokasi	Jumlah laporan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	4 Lap	420,768,500.00	APBD-DBH		4 Lap	420,768,500.00			
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	11 Kab/kota	Jumlah Laporan Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK	11 Lap	550,000,000.00	APBD-DBH		11 Lap	550,000,000.00			
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				30,479,030,734.00				30,479,030,734.00			
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 Dok	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersedia	1 Dok	367,497,410.00	APBD-DBH		1 Dok	367,497,410.00			
3.28.03.1.04.02	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	Malteng, SBB, SBT, Buru, Malra dan MBD	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	17,875,000,000.00	APBD-DBH		600 Ha	17,875,000,000.00			
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	11 Kab/Kota	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	8,810,493,432.00	APBD-DBH		50 Ha	8,810,493,432.00			
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Ambon, dan SBT	Jumlah kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	2 Unit	2,568,785,042.00	APBD-DBH		2 Unit	2,568,785,042.00			
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Lap	857,254,850.00	APBD-DBH		11 Lap	857,254,850.00			
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Berkurangnya tingkat kerusakan hutan		8,479,066,949.00				8,479,066,949.00			
3.28.03.1.05.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Lap	1,778,841,965.00	APBD-DBH		11 Lap	1,778,841,965.00			
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulungan Kebakaran Hutan dan Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi dan Sarpras Kebakaran Hutan yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Lap	6,700,224,984.00	APBD-DBH		11 Lap	6,700,224,984.00			
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu				300,000,000.00							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Tahun 2024					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.03.1.07.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kyu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Kab/kota	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah dan Pembinaan pengendalian pengelolaan IUIPHHK	90 Unit	300,000,000.00	APBD-DBH		90 Unit	300,000,000.00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	79.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	79.00 Persen	275,706,848.00			79.00 Persen	275,706,848.00
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				40,500,000.00				40,500,000.00
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	P. Ambon	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Lap	40,500,000.00	APBD-DBH		1 Lap	40,500,000.00
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk		235,206,848.00				235,206,848.00
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Buru, Malteng, SBT	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6 Ha	235,206,848.00	APBD-DBH		6 Ha	235,206,848.00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN				7,290,092,500.00				7,290,092,500.00
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				7,290,092,500.00				
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	11 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	3,501,000,000.00	APBD-DBH		15 Kelompok	3,501,000,000.00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11 Kab/Kota	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	15 Kelompok	3,789,092,500.00	APBD-DBH		15 Kelompok	3,789,092,500.00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	7,800,000,000.00			68.00 Persen	7,800,000,000.00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				7,800,000,000.00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Tahun 2024					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	11 Kab/kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dok	750,000,000.00	APBD-DBH		1 Dok	750,000,000.00
3.28.06.1.01.02	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Buru, Bursel, Malra, SBB, Malteng dan SBT	Jumlah bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug	450 Unit	6,300,000,000.00	APBD-DBH		450 Unit	6,300,000,000.00
3.28.06.1.01.02	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11 Lap	750,000,000.00	APBD-DBH		11 Lap	750,000,000.00
Grand Total					90,631,032,941.00				90,631,032,941.00

Ambon, Maret 2023
**Pt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku,**

Ir. SADLI IE, M.Si, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199403 1 010